

# **How to Conduct Due Diligence for Company Characteristics in Indonesian Corporate Law (Bagaimana Melakukan Uji Tuntas Karakteristik Perusahaan dalam Hukum Korporasi Indonesia)**

**Nama** : Isabella Efendi  
**NIM** : 212040100030  
**Prodi** : Hukum/4A1  
**Matkul** : Hukum Perusahaan

## **PENDAHULUAN**

Mochammad Tanzil adalah penulis Buku Teks Hukum Perusahaan; Noor Fatimah Mediawati adalah mullahnya. ISBN: 978-623-464-061-8 Sri Budi Purwaningsih Redaksi: S.H., M.Kn. Mahardika Darmawan, M. Tanzil Multazam KW, SPD, dan MPD Wiwit Wahyu Wijayanti, copyeditor Wiwit Wahyu Wijayanti membuat tata letak sampul, dan UMSIDA Press menerbitkan bukunya. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terletak di Jl. Mojopahit No. 666B di Sidoarjo, Jawa Timur. pencetakan awal, Februari 2023. “Buku Teks Hukum Perusahaan” ini merupakan referensi menyeluruh bagi para akademisi dan pengacara yang mempelajari hukum perusahaan di Indonesia. Untuk memisahkan diri dari teks-teks lain, yang satu ini membagi tema-tema hukum korporasi ke dalam kategori-kategori berdasarkan jenis firma. menangani berbagai masalah, seperti fitur perusahaan, yayasan, organisasi, permodalan, pembuatan kebijakan, kewajiban, dan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembubaran, doktrin, dan kejahatan perusahaan Untuk individu yang memiliki pemahaman mendasar tentang perdata, pidana Indonesia, dan sistem peradilan, sumber daya ini sempurna. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah mendanai Program Hibah Buku Teks 2022.(Multazam dkk., 2023)

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, MODAL INTELEKTUAL, DAN ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI-NILAI PERUSAHAAN Fauzia, Norma, dan Lailatul Amanah adalah penulisnya. Journal of Accounting Science and Research (JIRA) 5.4 (2016): “Pengaruh Intellectual Capital, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan.” Tujuan dari penulis jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh modal intelektual, struktur kepemilikan, potensi pertumbuhan, dan pengungkapan CSR. Sebuah bisnis sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan populasi dari penelitian ini. Catatan keuangan dari tahun 2012 hingga 2014 menjadi sumber datanya. 24 bisnis dipilih sebagai contoh berdasarkan standar ini.

TEORI DAN PRINSIP MENINBEK JILBAB PERUSAHAAN DALAM ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN Soumatera Law Rev., vol. 1, tidak. 2, hlm. 380-399, S. Dewi, “Mengetahui Doktrin dan Prinsip Menembus Tabir Korporasi dalam Hukum Perusahaan,” 2018. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk memastikan sektor bisnis, ada perusahaan dan entitas komersial yang belum menjadi bisnis. Perusahaan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuk hukumnya: yang berstatus badan hukum dan yang tidak. Tanggung jawab pemegang

saham PT terbatas pada nilai saham yang mereka miliki di perusahaan karena mereka adalah badan hukum yang terpisah.(Dewi, 2018)

## **TAHAPAN 1**

Due diligence adalah proses penting yang dilakukan oleh para investor sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Di Indonesia, proses due diligence perusahaan dilakukan dalam tiga tahap: persiapan, penyelidikan, dan penyajian hasil. Tujuan dari melakukan due diligence perusahaan di Indonesia adalah memberikan informasi penting sebanyak mungkin kepada para investor agar dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan tepat. Selama proses due diligence, ada beberapa hal yang harus dikaji. Hal-hal tersebut meliputi pajak, kesesuaian strategis dan kinerja masa depan, kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, dan lisensi.

## **TAHAPAN 2**

Contoh referensi [1], contoh referensi [2]

Carilah How To di Buku referensi 1. Kemudian kopas isi buku tersebut, dan lakukan parafrase di chat gpt. Uji tuntas karakteristik perusahaan dalam hukum korporasi Indonesia juga dikenal sebagai legal due diligence. Konsultan hukum akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta yang relevan untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan atau objek transaksi tersebut. (1)

Dalam melakukan uji tuntas, terdapat beberapa hal yang harus diperiksa. Hal-hal tersebut meliputi pemeriksaan akta, perizinan, aset dan bebas perkara. Dalam melakukan uji tuntas atau legal due diligence, terdapat beberapa hal yang harus diperiksa. Hal-hal tersebut meliputi pemeriksaan akta, perizinan, aset dan bebas perkara. Dalam praktik hukum perusahaan, doktrin "piercing the corporate veil" digunakan untuk mengatasi situasi di mana suatu badan hukum digunakan secara penyalahgunaan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ciri utama suatu badan hukum adalah pemisahan antara harta kekayaannya dengan harta pribadi para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, Pemilik saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum yang lebih besar dari nilai sahamnya.

Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk "menembus" atau "menembus" tirai badan hukum ini, yang berarti mereka mengabaikan pemisahan hukum antara badan hukum dan pemegang sahamnya. Hal ini dilakukan ketika terbukti bahwa badan hukum tersebut digunakan untuk tujuan penipuan, kecurangan, atau kegiatan ilegal lainnya yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga atau menciptakan ketidakadilan.(2)

Pada saat melakukan due diligence, berkaitan dengan "piercing the corporate veil" akan menekankan pada penilaian risiko terkait integritas dan kepatuhan badan hukum yang sedang ditinjau. Dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap struktur perusahaan, catatan keuangan, kepemilikan saham, dan dokumen-dokumen lain yang dapat mengungkapkan kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan atau tindakan yang melanggar hukum. Tujuan dari narasi ini

adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang risiko potensial yang terkait dengan pemisahan antara badan hukum dan pemegang sahamnya, serta kemungkinan terjadinya "piercing the corporate veil" jika terungkap adanya praktik-praktik ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. (Fauzia & Amanah, 2016)

Dalam melakukan due diligence, sangat penting untuk melibatkan ahli hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa semua aspek hukum terkait dengan "piercing the corporate veil" dipertimbangkan secara seksama. Karena "piercing the corporate veil" merupakan doktrin hukum yang rumit dan dapat berbeda di setiap yurisdiksi, narasi yang disusun harus memperhitungkan aturan dan putusan pengadilan yang relevan dalam yurisdiksi yang bersangkutan.

### **TAHAPAN 3**

Contoh referensi [3]

Berikut tahapan dan aspek utama dalam melakukan due diligence terhadap karakteristik perusahaan dalam hukum korporasi Indonesia:

Identifikasi masalah hukum utama: Uji tuntas harus dilakukan oleh pengacara yang terbiasa menangani transaksi M&A dan mampu mengidentifikasi masalah hukum utama

Siapkan dokumen penting: Perusahaan target harus menyiapkan semua dokumen penting dan pelengkapannya untuk proses uji tuntas hukum.

Review dokumen: Proses due diligence harus melibatkan review menyeluruh dan pemeriksaan silang beberapa dokumen, termasuk yang terkait dengan badan perusahaan dan kondisi objek transaksi

Mengevaluasi kondisi aktual perusahaan: Uji tuntas dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pembeli potensial untuk mengevaluasi kondisi aktual perusahaan atau memberikan informasi penting sebanyak mungkin kepada investor untuk membuat keputusan yang tepat.

Memahami aspek hukum dan aspek relevan lainnya: Uji tuntas sangat penting dalam transaksi M&A untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi perusahaan target, terutama aspek hukum dan aspek terkait lainnya

### **Simpulan**

Dengan melakukan due diligence terhadap karakteristik perusahaan, Anda akan lebih memahami kondisi dan risiko perusahaan. Hasil uji tuntas dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat mengenai perusahaan, seperti merger dan akuisisi, investasi, atau kemitraan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesimpulan ini memberikan gambaran umum, dan dalam situasi kehidupan nyata, faktor dan pertimbangan tambahan mungkin ikut berperan. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari nasihat profesional dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berspesialisasi dalam hukum korporasi Indonesia untuk memastikan kepatuhan dan uji tuntas yang komprehensif.

## **REFRENSI**

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [2] S. Dewi, "Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan," *Soumatera Law Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 380–399, 2018.
- [3] Fauzia, Norma, and Lailatul Amanah. "Pengaruh intellectual capital, karakteristik perusahaan, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.4 (2016).